

RESEARCH ARTICLE

Peran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bulusari

Naya Putri Syafira^{1*}, Bintis Ti'anatud Diniati², Eliana Rahmadewi³, Riska Fibrianti⁴, Yunita Dian Anggraini⁵

^{1*,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Indonesia.

Email: nayaps960@gmail.com^{1*}, bintis.t.diniati@gmail.com², eli46008@gmail.com³, fibriantiriska39@gmail.com⁴, yunitadiananggraini76@gmail.com⁵

Histori Artikel:

Dikirim 16 Desember 2025; Diterima dalam bentuk revisi 20 Desember 2025; Diterima 20 Februari 2026; Diterbitkan 1 April 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Syafira, N. P., Diniati, B. T., Rahmadewi, E., Fibrianti, R., & Anggraini, Y. D. (2026). Peran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bulusari. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(2), 1247-1252. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i2.6129>.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengelolaan Dana Desa di Desa Bulusari serta pengaruh perubahan kebijakan nasional terhadap praktik pembangunan di tingkat lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa desa tetap mengikuti prosedur pemerintah meskipun terjadi pergeseran prioritas antarperiode pemerintahan. Partisipasi masyarakat menjadi inti proses melalui musyawarah dusun dan desa yang menggali kebutuhan warga. Sebagian besar usulan berfokus pada pembangunan infrastruktur dan layanan sosial dasar. Masalah utama yang ditemukan adalah ketiadaan drainase yang berdampak pada warga pembudidaya ikan. Walaupun drainase selalu menjadi prioritas, realisasinya terbatas karena kebijakan pusat yang menekankan program ketahanan pangan. Transparansi dijalankan melalui dokumentasi, papan informasi, dan penggunaan aplikasi Siskeudes. Pengawasan dari pihak kecamatan dan kabupaten turut memperkuat akuntabilitas. Namun, keterbatasan kemampuan administrasi dan digital aparat desa menghambat penyusunan laporan secara optimal. Penguatan kapasitas aparat dan penyesuaian kebutuhan lokal dengan kebijakan nasional menjadi kunci peningkatan tata kelola Dana Desa.

Kata Kunci: Dana Desa; Transparansi; Laporan Pertanggungjawaban.

Abstract

This study examines the governance of Village Funds in Bulusari Village and the influence of national policy changes on local development practices. The findings show that the village consistently follows government procedures despite shifting priorities between presidential administrations. Community participation remains central through hamlet and village meetings that gather local needs. Most proposals focus on infrastructure development and essential social services. A major problem identified is the lack of drainage affecting fish-farming households. Although drainage is repeatedly prioritized, its implementation remains limited due to national food-security policies. Transparency is maintained through documentation, information boards, and the use of the Siskeudes financial system. Regular supervision from district authorities strengthens accountability. However, limited administrative and digital skills among village officials hinder optimal reporting. Strengthening human resources and aligning local needs with national priorities are crucial for improving Village Fund management.

Keyword: Village Fun; Transparency; Accountability Reports.

1. Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan elemen penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kapasitas wilayah secara berkelanjutan. Melalui kebijakan Dana Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberi ruang lebih luas untuk membangun infrastruktur, memperbaiki layanan publik, serta mengelola potensi lokal secara mandiri. Kebijakan ini membuka kesempatan bagi desa untuk mempercepat pemerataan pembangunan sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat setempat. Pengelolaan Dana Desa menjadi bagian yang sangat penting karena dana tersebut disalurkan langsung kepada desa untuk mendukung berbagai program utama. Dana ini difokuskan pada peningkatan ekonomi lokal serta kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik maupun kegiatan pemberdayaan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur desa sangat bergantung pada mutu perencanaan, koordinasi, serta akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana tersebut (Radhi *et al.*, 2025).

Selain itu, penerimaan Dana Desa menuntut pemerintah desa untuk mampu mengelola anggaran dengan baik. Tidak semua desa memiliki kapasitas yang cukup dalam menyusun rencana, mengatur keuangan, dan menjalankan fungsi pengawasan. Akibatnya, beberapa desa masih mengalami hambatan, khususnya dalam aspek keterbukaan informasi, ketelitian perencanaan, dan ketepatan dalam menyusun program pembangunan. Karena itu, penerapan tata kelola yang baik menjadi sangat penting agar Dana Desa dapat dimanfaatkan secara tepat dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan. Tata kelola yang baik mencakup nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan. Pemerintah desa harus meningkatkan profesionalisme dalam menyusun program pembangunan dan mengelola anggaran secara efektif. Dengan demikian, kajian mengenai pengelolaan Dana Desa dan kontribusinya terhadap pembangunan desa sangat diperlukan. Faktor seperti transparansi, akuntabilitas, serta kemampuan desa dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan berperan besar dalam menentukan keberhasilan penggunaan Dana Desa. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini tidak hanya membantu menilai efektivitas pengelolaan dana, tetapi juga memberikan gambaran mengenai sejauh mana pembangunan desa telah terlaksana sesuai kebutuhan dan tujuan masyarakat. (Wulandari *et al.*, 2025).

2. Tinjauan Pustaka

Dana Desa merupakan bentuk alokasi anggaran yang diberikan pemerintah untuk mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Dana ini digunakan untuk membiayai administrasi pemerintahan, pembangunan infrastruktur, peningkatan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik. Secara regulasi, Dana Desa mulai diberlakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa Dana Desa bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui pemerintah kabupaten atau kota sebagai bentuk dukungan terhadap otonomi desa (Ridwan & Manduapessy, 2024). Selanjutnya, Dana Desa digunakan sebagai instrumen pembanguan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur sosial desa, dan memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas publik. Penyaluran Dana Desa mempertimbangkan beberapa indikator seperti data jumlah penduduk desa, tingkat kemiskinan, luas wilayah administrasi, serta tingkat kesulitan geografis.

Dengan demikian, mekanisme distribusi Dana Desa tidak hanya mengacu pada pemerataan anggaran, tetapi juga mempertimbangkan keadilan alokasi berdasarkan kebutuhan dan kondisi objektif setiap desa (Widiantoro, 2020). Secara strategis, Dana Desa berperan dalam mendorong kemandirian Desa melalui peningkatan kapasitas ekonomi lokal dan pembangunan yang berkelanjutan. Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk memperkuat institusi desa, memperbaiki infrastruktur dasar, serta mendukung program masyarakat agar tercipta partisipasi aktif dalam pembangunan. Dengan adanya Dana Desa, diharapkan

RESEARCH ARTICLE

terjadi percepatan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa sehingga kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan dapat diminimalkan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai Peran Dana Desa Bulusari, Kabupaten Tulungagung, pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali informasi secara naturalistik dan sesuai konteks lapangan, khususnya terkait bagaimana transparansi dan laporan pertanggung jawaban diterapkan dalam pembangunan infrastruktur desa. Penelitian dilaksanakan di Desa Bulusari dengan mempertimbangkan ketersediaan data serta adanya kegiatan pembangunan infrastruktur. Data penelitian terdiri dari data utama yang diperoleh melalui wawancara dengan Informan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Seluruh proses penelitian mengikuti prinsip etika penelitian, termasuk meminta izin kepada pemerintah desa, menjaga kerahasiaan informasi, dan memastikan partisipasi informan secara sukarela.



Gambar 1. Menjaga Kebersihan

Tabel 1. Dana Desa di Desa Bulusari Tahun 2025

No	Komponen	Nominal	Keterangan
1.	Dana Desa	Rp. 844.737.000	Total Dana Desa Bulusari
2.	Pembangunan Infrastruktur	Rp. 380.000.000	Pavingisasi, Drainase, Penerangan Jalan.
3.	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 120.000.000	Pelatihan Usaha, UMKM, Perikanan.
4.	Bidang Penanggulangan Kemiskinan	Rp. 150.000.000	Bantuan Langsung Tunai
5.	Ketahanan Pangan	Rp. 80.000.000	Program Perikanan
6.	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 90.000.000	Operasional dan Tunjangan Perangkat

Dari hasil penelitian pada tahun 2025, Desa Bulusari di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung memperoleh Dana Desa sebesar Rp 844.737.000. Anggaran ini kemudian dibagi ke beberapa sektor sesuai kebutuhan pembangunan desa. Bagian terbesar dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur, yaitu sekitar Rp 380.000.000 dari total dana. Anggaran ini digunakan untuk memperbaiki dan membangun berbagai sarana fisik seperti jalan desa, saluran drainase, fasilitas air bersih, serta sejumlah fasilitas umum lainnya. Sektor lain yang memperoleh pendanaan meliputi pemberdayaan masyarakat (Rp 120 juta), BLT Dana Desa (Rp 150 juta), program ketahanan pangan (Rp 80 juta), serta penyelenggaraan pemerintahan desa (Rp 90 juta). Secara keseluruhan, pemanfaatan Dana Desa tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup warga, memperlancar kegiatan ekonomi, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui pembangunan fisik dan program pemberdayaan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Bulusari berlangsung melalui tahapan yang telah diatur pemerintah dan diterapkan secara konsisten setiap tahun, meskipun terjadi perubahan kebijakan nasional seiring pergantian pemerintahan. Pergeseran regulasi dari masa Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto berdampak pada perubahan fokus penggunaan Dana Desa, terutama dalam menentukan kegiatan mana yang boleh dan tidak boleh didanai (Intleman & Idayati, 2020). Meski demikian, aparatur desa tetap mengikuti pedoman resmi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh program pembangunan Dana Desa selalu diawali dengan Musyawarah Dusun (MusDus) di Dua wilayah, yaitu Dusun Mulyosari dan Dusun Karangsari. Aspirasi yang terkumpul dari musdus kemudian dibawa ke musyawarah desa untuk menentukan prioritas utama. Selama beberapa tahun terakhir, mayoritas usulan masyarakat berkaitan dengan pembangunan fisik seperti jalan makadam, pavingisasi, talud dekat area pemakaman, lampu penerangan jalan, hingga pembangunan pasar desa. Selain pembangunan infrastruktur, Dana Desa juga digunakan untuk kegiatan layanan sosial dan kesehatan, termasuk posyandu untuk balita, ibu hamil, remaja, dan lansia.

Hasil penelitian ini adalah persoalan drainase. Sekitar 60–70% warga bekerja sebagai pembudidaya ikan gurami, patin, dan lele. Aktivitas tersebut menghasilkan air limbah yang perlu dialirkan secara rutin. Ketidadaan drainase menyebabkan air limbah menggenang, menimbulkan bau, menjadi sarang nyamuk, dan berpotensi memicu konflik antarwarga. Walaupun kebutuhan drainase selalu muncul sebagai prioritas di tiap musdus, realisasinya baru sekitar 20% karena aturan terbaru pemerintah pusat menetapkan program ketahanan pangan sebagai prioritas Dana Desa tahun anggaran berjalan. Dari aspek transparansi, pemerintah Desa Bulusari menunjukkan komitmen kuat dengan menyediakan bukti dokumentasi setiap kegiatan, baik berupa foto, kuitansi, hingga laporan yang diunggah melalui media informasi desa. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) digunakan sebagai alat utama pencatatan dan pelaporan keuangan. Selain itu, proses pengawasan dilakukan secara berkala oleh kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan inspektorat kabupaten. Meski demikian, penelitian menemukan bahwa Informan masih menghadapi hambatan dalam kemampuan administrasi dan pengoperasian sistem digital. Walaupun mereka sudah mengikuti beberapa pelatihan, proses penyusunan laporan tetap membutuhkan pendampingan. Pelaksanaan kegiatan di lapangan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD), kemudian diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.

4.2 Pembahasan

Peran Dana Desa di Desa Bulusari mencerminkan dinamika hubungan antara kebutuhan lokal dan kebijakan pemerintah pusat. Meskipun desa memiliki kebutuhan yang sangat spesifik, seperti pembangunan drainase yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang mayoritas bergerak di sektor budidaya ikan, penggunaan Dana Desa tetap harus mengacu pada prioritas nasional yang dapat berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan tantangan, terutama ketika kebutuhan lokal tidak sepenuhnya bisa direalisasikan sesuai harapan. Masyarakat desa secara aktif berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui musyawarah dusun dan desa, di mana usulan warga digunakan untuk menentukan prioritas pembangunan. Meskipun implementasinya harus disesuaikan dengan regulasi pusat, Dana Desa tetap menjadi alat penting untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan. Dengan demikian, Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan fisik, tetapi juga berkontribusi pada penguatan tata kelola pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Bulusari diwujudkan melalui penyampaian informasi yang terbuka kepada publik, menggunakan berbagai media seperti papan pengumuman, banner, dan platform digital desa. Masyarakat diberikan akses untuk mengikuti perkembangan program dari perencanaan hingga pelaksanaan, memungkinkan mereka untuk mengetahui arah penggunaan Dana Desa secara lebih jelas dan terukur.

RESEARCH ARTICLE

Penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) juga membantu mencatat dan melaporkan keuangan dengan rapi, valid, dan mudah diverifikasi. Langkah ini berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan mengurangi risiko penyimpangan anggaran. Transparansi menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan desa yang jujur, bertanggung jawab, dan melibatkan masyarakat. Namun, meskipun Desa Bulusari sudah menyusun laporan penggunaan Dana Desa dengan bukti administratif yang lengkap, masih terdapat kendala dalam kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa. Banyak aparat desa yang belum memiliki kemampuan administratif dan digital yang memadai, sehingga proses penyusunan laporan sering membutuhkan pendampingan. Keterbatasan ini memengaruhi efektivitas pengelolaan Dana Desa, terutama dalam aspek pelaporan yang memerlukan ketelitian dan ketepatan waktu. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi hal yang mendesak untuk memastikan laporan pertanggungjawaban dapat disusun dengan lebih optimal dan sesuai ketentuan.

5. Kesimpulan

Pengelolaan Dana Desa di Desa Bulusari menunjukkan bahwa desa telah menjalankan tata kelola yang sesuai dengan mekanisme resmi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Proses musyawarah berjenjang, seperti Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes), berperan penting dalam memastikan partisipasi masyarakat dan menggali kebutuhan riil warga. Meskipun drainase selalu menjadi kebutuhan utama masyarakat yang berkaitan dengan aktivitas budidaya ikan, realisasinya terhambat oleh perubahan prioritas nasional yang mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan lokal, tetapi juga harus selaras dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dari aspek tata kelola, Desa Bulusari telah menerapkan transparansi dengan baik, baik melalui penyediaan informasi publik, dokumentasi fisik, maupun penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Pengawasan dari kecamatan dan kabupaten juga berjalan rutin. Namun, keterbatasan kapasitas administrasi dan literasi digital aparat desa masih menjadi kendala, terutama dalam penyusunan laporan dan pengoperasian sistem keuangan. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan Dana Desa sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia desa dalam menjalankan prosedur teknis dan administratif. Untuk itu, pemerintah desa perlu meningkatkan upaya penyesuaian antara kebutuhan lokal dan prioritas nasional melalui pendampingan dari pemerintah kabupaten agar kebutuhan mendesak, seperti drainase, dapat memperoleh pendanaan dari sumber lain seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bantuan provinsi, atau program lintas sektor. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan berkelanjutan terkait administrasi, pengelolaan keuangan, dan penggunaan aplikasi digital seperti Siskeudes juga menjadi hal yang penting. Perencanaan pembangunan sebaiknya berbasis data yang menggambarkan dampak buruk ketiadaan drainase terhadap kesehatan dan ekonomi warga, agar usulan pembangunan dapat lebih terarah dan kuat. Penguatan transparansi juga perlu dilakukan dengan memperluas media informasi publik, termasuk pengembangan dashboard digital yang menampilkan progres pembangunan dan penggunaan anggaran secara real-time. Pemerintah desa juga dapat membangun kolaborasi dengan kelompok pembudidaya ikan untuk menciptakan solusi sementara dalam pengelolaan limbah, sehingga masalah bau, genangan, dan potensi konflik dapat dikurangi sambil menunggu pembangunan drainase secara lebih menyeluruh. Kolaborasi ini akan memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan desa.

RESEARCH ARTICLE

6. Referensi

- Hardianti, S. (2017). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa (program alokasi dana desa di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota)* (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Hariyanto, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 12(1), 24-29. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323>.
- Intleman, M. W., & Idayati, F. (2020). Dampak pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 13(8), 1–19.
- Permatasari, A. E. (2024). Signifikansi Peran Aktif Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Membangun Desa. *JCOMENT (Journal of Community Empowerment)*, 5(2), 37-50.
- Radhi, F., Maizuar, M., Wesli, W., Fithra, H., & Jalil, A. (2025). Efektivitas pembangunan infrastruktur perdesaan melalui program Dana Desa Kabupaten Pidie Jaya. *Teras Jurnal: Jurnal Teknik Sipil*, 15(1). <https://doi.org/10.29103/tj.v15i1.1215>.
- Ridwan, R., & Manduapessy, R. L. (2024). Efektivitas Dana Desa bagi pembangunan perekonomian dan infrastruktur pedesaan di Distrik Mimika Timur. *Jurnal Kritis*, 8(1), 88–95.
- Rohman, M. F., Faidah, S. M., & Supriyanto. (2024). Kontribusi Dana Desa pada pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi di Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang tahun 2018–2022. *eBA Journal*, 11(2), 35–45.
- Saputra, H. C. P., & Wahyuni, S. (2022). Pemanfaatan alokasi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pandu Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. *Public Sphere Review: Journal of Public Administration*, 1(2), 8–14. <https://doi.org/10.30649/psr.v1i2.31>.
- Sianturi, R. (2016). Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur melalui kebijakan alokasi Dana Desa di Desa Bebakung Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung. *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, 4(1), 2153–2166.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295-302.
- Supriadi, V. E., Soelistyo, A., & Syaifullah, Y. (2020). Analisis pengaruh Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 4(3), 401–413.
- Tambunan, B. H., Sihombing, M., & Harahap, R. H. (2020). Peranan Dana Desa dalam Pengembangan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. *Perspektif*, 9(2), 439-446.
- Widiantoro, S. (2020). Optimalisasi alokasi Dana Desa pada pembangunan infrastruktur sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sumberdadap. *Jurnal Meta Yuridis*, 3(2), 113–125.
- Wulandari, M., Mawardani, P., Rohmat, Z., & Hayati, S. S. (2025). Evaluasi penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan: Studi kasus di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen (JPENG)*, 2(1), 3752–3763. <https://doi.org/10.26710/jpeng.v2i1.292311>.